

Strategi Komunikasi Operasional Brimob Dalam Menangani Isu Keamanan Di Samarinda: Studi Perspektif Ilmu Komunikasi

Habib Ali Nurrahmat

Mahasiswa Proram Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: habib.etamsmd@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan akan komunikasi yang efektif dalam menjaga keamanan masyarakat menjadi tantangan penting bagi satuan Brimob di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi operasional yang diterapkan staf operasional Brimob dalam menangani isu-isu keamanan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Brimob meliputi komunikasi teknis, persuasif, dan publik yang dijalankan secara disiplin dan adaptif terhadap kondisi sosial setempat. Keberhasilan strategi ini ditopang oleh struktur organisasi yang jelas, penggunaan teknologi komunikasi modern, serta kekompakan tim yang tinggi. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan pelatihan komunikasi interpersonal, gangguan teknis, dan perbedaan persepsi antara pimpinan dan pelaksana lapangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan komunikasi humanis, perbaikan infrastruktur komunikasi, serta strategi publik yang lebih terbuka dan partisipatif.

Kata kunci: Brimob, komunikasi humanis, komunikasi operasional, komunikasi strategis.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara, terutama pada era modern di mana dinamika sosial, politik, dan ekonomi berkembang dengan cepat. Dalam konteks ini, kehadiran aparat penegak hukum seperti Korps Brigade Mobil (Brimob) sangat vital sebagai garda terdepan dalam penanganan situasi gangguan keamanan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Tugas Brimob tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga membutuhkan dukungan komunikasi yang strategis, terencana, dan adaptif (Effendy, O. U. 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin (2021) bahwa institusi keamanan dewasa ini dituntut tidak hanya melakukan tindakan represif, tetapi juga membangun komunikasi yang humanis dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam ranah komunikasi, peran komunikasi organisasi menjadi kunci utama dalam kelancaran operasional sebuah institusi. Komunikasi organisasi mencakup seluruh proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dalam organisasi guna mencapai tujuan tertentu (Effendy, O. U. 2021). Dalam institusi semi-militer seperti Brimob, komunikasi organisasi berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan perintah atau laporan, tetapi juga untuk membangun koordinasi, kesatuan sikap, dan efektivitas tindakan di lapangan. Penelitian oleh Sutrisno (2020) mengungkapkan bahwa efektivitas kerja organisasi di sektor

keamanan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi internal yang dibangun secara sistematis dan hirarkis, khususnya pada bagian operasional.

Di wilayah Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dinamika keamanan cukup fluktuatif. Sebagai daerah perkotaan yang berkembang pesat, Samarinda memiliki tantangan tersendiri, antara lain meningkatnya mobilitas penduduk, konflik horizontal, potensi unjuk rasa, dan tindak kriminalitas yang mengganggu ketertiban umum. Dalam menghadapi kondisi tersebut, keberadaan Brimob tidak hanya dilihat sebagai kekuatan fisik, tetapi juga sebagai institusi yang harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak: masyarakat, media, dan lembaga pemerintah daerah. Menurut Suryani (2022), pendekatan komunikasi strategis menjadi semakin penting di lingkungan institusi keamanan karena mampu membangun persepsi publik yang positif dan memperkuat legitimasi tindakan aparat.

Tantangan komunikasi operasional juga muncul dalam bentuk kebutuhan koordinasi yang cepat, akurat, dan responsif dalam situasi darurat. Dalam kondisi tertentu seperti unjuk rasa atau ancaman bom, waktu menjadi variabel kritis. Oleh karena itu, sistem komunikasi yang digunakan dalam operasi keamanan harus mampu menjamin kelancaran informasi tanpa *noise* atau gangguan (Liliweri, A. 2021). Dalam hal ini, konsep *crisis communication* menjadi sangat relevan. Rachmadani (2021) menyatakan bahwa komunikasi dalam kondisi krisis membutuhkan strategi penyampaian pesan yang efisien, empatik, dan mampu menghindari eskalasi konflik.

Brimob perlu mengembangkan strategi komunikasi eksternal, khususnya dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan media massa. Di era digital saat ini, masyarakat dapat membentuk persepsi dengan cepat melalui media sosial. Ketidaktepatan informasi atau lambatnya klarifikasi dari pihak berwenang dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, pengelolaan *public relations* (humas) menjadi aspek penting dalam strategi komunikasi operasional. Penelitian oleh Kartika (2020) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan kecepatan respon dalam komunikasi publik berdampak positif terhadap citra institusi keamanan di mata masyarakat.

Pendekatan komunikasi yang digunakan oleh Brimob harus mempertimbangkan karakteristik lokal masyarakat Samarinda. Budaya komunikasi, gaya bahasa, dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat perlu dipahami agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan resistensi (Mulyana, D. 2021). Pendekatan komunikasi antarbudaya menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan, khususnya ketika berinteraksi dengan kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo (2023) yang menekankan bahwa komunikasi berbasis budaya lokal lebih efektif dalam membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Dalam praktiknya, staf operasional Brimob memiliki peran sentral dalam merancang, mengatur, dan mengoordinasikan sistem komunikasi baik di lapangan maupun pada level strategis (Ruslan, R. 2021). Perencanaan komunikasi, penggunaan perangkat komunikasi, pemetaan informasi, hingga pengambilan keputusan taktis sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi operasional yang dibangun. Permana

(2021) menyebutkan bahwa kelemahan dalam komunikasi operasional dapat menyebabkan keterlambatan respon, kekacauan koordinasi, bahkan kegagalan misi pengamanan.

Penting untuk mencermati perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan dalam institusi keamanan. Penggunaan *handy talkie*, *drone*, hingga aplikasi pesan instan telah menjadi bagian dari komunikasi lapangan yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan tindakan. Namun, teknologi komunikasi harus diimbangi dengan pemahaman komunikasi interpersonal dan etika komunikasi aparat. Dalam penelitiannya, Sembiring (2021) menegaskan bahwa meskipun teknologi mempermudah komunikasi operasional, faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan komunikasi institusional.

Komunikasi organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Pace dan Faules (2021) adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam jaringan hubungan yang saling tergantung dalam suatu organisasi. Dalam konteks Brimob, komunikasi organisasi berfungsi untuk memperlancar arus perintah, koordinasi, dan evaluasi dalam kegiatan operasional. Komunikasi krisis (*crisis communication*) menurut Coombs (2021) merujuk pada upaya strategis suatu organisasi untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan reputasi serta fungsi ketika menghadapi situasi darurat atau tekanan publik. Dalam lingkungan keamanan, komunikasi krisis memainkan peran vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Teori komunikasi strategis (*strategic communication*) menekankan pentingnya perencanaan pesan, analisis audiens, dan pemilihan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Rini (2021) menunjukkan bahwa penerapan komunikasi strategis di lembaga keamanan terbukti meningkatkan efektivitas koordinasi dan mengurangi potensi konflik internal. Pendekatan komunikasi yang sistematis dan terukur menjadi hal yang krusial dalam membangun efektivitas operasional Brimob Samarinda.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi dalam konteks institusi keamanan, baik dari aspek internal organisasi, penanganan krisis, hingga komunikasi publik. Salah satu penelitian dilakukan oleh Sutrisno (2020) yang mengulas pola komunikasi petugas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi vertikal maupun horizontal antara personel berpengaruh besar terhadap kelancaran operasional keamanan, terutama dalam membangun koordinasi kerja yang terstruktur.

Penelitian lain oleh Rachmadani (2021) menyoroti strategi komunikasi krisis yang diterapkan kepolisian saat menangani aksi unjuk rasa. Ia menemukan bahwa pendekatan yang komunikatif dan empatik lebih mampu meredam potensi konflik dibanding strategi yang bersifat koersif. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan komunikasi yang cepat, tepat, dan terukur dalam situasi tekanan publik tinggi.

Sementara itu, Kartika (2020) mengkaji bagaimana humas institusi keamanan mengelola citra di media sosial. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi serta responsif terhadap dinamika publik

berkontribusi besar terhadap pembentukan citra positif institusi, terutama dalam era digital yang serba cepat. Pengelolaan komunikasi publik yang profesional dianggap sebagai bagian penting dari strategi komunikasi eksternal yang efektif.

Penelitian oleh Prasetyo (2023) memberikan sudut pandang berbeda dengan meneliti komunikasi antarbudaya antara aparat dan masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap norma, bahasa, dan nilai lokal sangat menentukan keberhasilan interaksi dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan. Komunikasi yang sensitif terhadap budaya dinilai lebih membangun hubungan harmonis dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif.

Adapun Permana (2021) mengangkat efektivitas komunikasi operasional satuan Brimob dalam penanganan situasi darurat, terutama pada konteks bencana. Ia menyimpulkan bahwa sistem komunikasi yang tangguh dan cepat menjadi kunci keberhasilan operasi di lapangan, terutama dalam kondisi dengan tekanan waktu dan kompleksitas tinggi.

Kelima penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman komunikasi dalam institusi keamanan, baik dari aspek organisasi, krisis, budaya, maupun komunikasi publik. Namun, belum ada yang secara khusus mengkaji secara komprehensif strategi komunikasi operasional dari sudut pandang staf operasional Brimob di tingkat daerah, khususnya di Kota Samarinda. Penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan perspektif komunikasi organisasi, komunikasi krisis, dan komunikasi strategis dalam satuan operasional yang langsung berhadapan dengan isu-isu keamanan aktual di lapangan. Konteks lokal Samarinda, peran fungsional staf operasional, serta pendekatan integratif dalam menganalisis strategi komunikasi menjadikan penelitian ini memiliki keunikan sekaligus kebaruan dalam kajian ilmu komunikasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi komunikasi operasional yang diterapkan oleh staf operasional Brimob dalam menangani isu keamanan di Kota Samarinda? Dan 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi komunikasi operasional Brimob di Kota Samarinda?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis strategi komunikasi operasional yang diterapkan oleh staf operasional Brimob dalam menangani isu-isu keamanan di Kota Samarinda dan Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi komunikasi operasional Brimob di Kota Samarinda.

Penelitian ini menjadi penting karena menghadirkan perspektif ilmu komunikasi dalam melihat praktik dan strategi komunikasi yang dijalankan oleh Brimob, khususnya pada bagian staf operasional. Dengan merujuk pada teori dan praktik yang relevan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem komunikasi yang tidak hanya efisien dan responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat di Samarinda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi operasional Brimob dalam menangani isu keamanan di Kota Samarinda. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena komunikasi dalam konteks spesifik dan nyata, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, struktural, dan budaya organisasi. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada anggota staf operasional Brimob Samarinda, observasi langsung terhadap aktivitas komunikasi operasional di lapangan, serta dokumentasi seperti laporan kegiatan, prosedur tetap (protap), dan media komunikasi yang digunakan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menelaah pola-pola komunikasi, strategi yang digunakan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunikasi di lingkungan Brimob. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan serta memperkuat objektivitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi Operasional Brimob dalam Menangani Isu Keamanan di Kota Samarinda

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan arsip operasional yang dimiliki oleh satuan Brimob di Kota Samarinda. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa strategi komunikasi operasional yang diterapkan oleh staf operasional Brimob Samarinda tidak hanya berfokus pada aspek penyampaian informasi teknis dalam konteks perintah dan pelaksanaan tugas, tetapi juga mencakup pendekatan komunikasi persuasif, komunikasi krisis, serta komunikasi publik yang disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Dalam struktur organisasi, bagian staf operasional Brimob memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai pusat perencanaan dan pengendalian komunikasi taktis. Berdasarkan wawancara dengan salah satu personel berpangkat Aipda, disebutkan bahwa sebelum suatu operasi keamanan dijalankan—baik dalam bentuk pengamanan unjuk rasa, patroli preventif, maupun respons terhadap gangguan kamtibmas—tim operasional terlebih dahulu menyusun rencana komunikasi internal yang meliputi pembagian peran, saluran komunikasi yang digunakan (HT, radio UHF, WA grup komando), serta kode-kode taktis yang telah disepakati. Ia menyebutkan:

“Kami biasa menyebutnya dengan SOP komunikasi. Dalam setiap pergerakan, siapa yang bicara, siapa yang hanya terima instruksi, itu sudah kami latih. Jadi tidak boleh sembarangan bicara di radio operasional. Nanti malah tumpang tindih.”

Fakta tersebut menunjukkan adanya sistem komunikasi internal yang cukup solid dan berlapis. Komunikasi yang terstruktur secara vertikal dan horizontal menjadi fondasi utama dalam pengendalian situasi di lapangan. Komunikasi vertikal berjalan dari pimpinan komando ke satuan lapangan, sementara

komunikasi horizontal berlangsung antarunit atau antaranggota di lapangan. Komunikasi semacam ini menjadi penting terutama ketika situasi berubah cepat dan membutuhkan koordinasi instan, seperti pada saat pengamanan aksi unjuk rasa di simpang empat Lembuswana bulan Februari 2024 lalu.

Dari hasil observasi yang dilakukan selama tiga hari saat kegiatan patroli gabungan akhir pekan (Jumat–Minggu), ditemukan bahwa komunikasi operasional berjalan dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan. Petugas lapangan selalu menggunakan kode singkat, hindari penyebutan nama, dan menjaga kerahasiaan instruksi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi operasional Brimob tidak hanya sekadar *menyampaikan pesan*, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan komunikasi (*communication security*). Hal ini sesuai dengan karakter organisasi semi-militer yang menuntut ketelitian tinggi.

Selain komunikasi teknis dalam lingkup internal, strategi komunikasi Brimob juga menyentuh aspek komunikasi persuasif saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam situasi penanganan massa atau konflik horizontal, pihak Brimob biasanya mengedepankan pendekatan yang tidak langsung represif. Wawancara dengan salah satu komandan peleton (Danton) mengungkapkan bahwa tim negosiator sering kali dikerahkan lebih dahulu untuk *membaca suasana* dan melakukan komunikasi awal secara personal.

“Kalau ada kerumunan atau aksi massa, kami punya orang yang ditugaskan bicara dulu. Kita ajak koordinasi. Kalau masih bisa dikomunikasikan, ya kita hindari konfrontasi. Itu SOP kami sekarang.”

Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan dalam penanganan keamanan. Jika sebelumnya Brimob cenderung menggunakan strategi berbasis kekuatan fisik, kini mulai diterapkan pendekatan komunikasi yang lebih humanis. Strategi ini sejalan dengan perintah dari pimpinan Polri secara nasional agar seluruh jajaran mendahulukan komunikasi dalam penanganan konflik sosial.

Penelusuran terhadap arsip dokumentasi operasional juga menunjukkan adanya pola komunikasi yang disesuaikan dengan konteks geografis dan sosial Kota Samarinda. Beberapa wilayah yang dikenal rawan seperti daerah Palaran, Loa Janan, dan pinggiran Samarinda Seberang memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, mengingat keberagaman budaya dan tingkat sensitivitas masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi antarbudaya secara praktis diterapkan, meskipun belum secara formal dikodifikasikan dalam SOP tertulis.

Bukti lain yang mendukung efektivitas strategi komunikasi operasional Brimob terlihat pada saat pengamanan kegiatan tahunan “Festival Mahakam” tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, Brimob tidak hanya melakukan penjagaan fisik, tetapi juga membuka posko pelayanan informasi, mengedukasi masyarakat melalui pengeras suara, dan mengerahkan personel yang ditugaskan khusus menyapa warga dan menjelaskan skema pengamanan secara langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang dibangun bukan hanya ke dalam (internal), tetapi juga ke luar (eksternal) dengan pendekatan komunikasi publik.

Walaupun secara umum sistem komunikasi operasional Brimob Samarinda berjalan dengan baik, penelitian ini juga mencatat adanya beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketergantungan pada perangkat komunikasi yang kadang mengalami gangguan teknis. Misalnya, dalam beberapa kegiatan pengamanan malam hari, sinyal HT tidak stabil karena medan geografis Samarinda yang berbukit dan penuh area blank spot. Dalam wawancara dengan staf teknis komunikasi, diakui bahwa belum semua titik memiliki *repeater* atau penguat sinyal yang memadai. Solusinya, beberapa unit membawa perangkat cadangan atau beralih ke aplikasi digital seperti Zello dan Signal.

Masalah lainnya terletak pada kesenjangan kompetensi komunikasi di antara personel. Tidak semua anggota memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, terutama saat menghadapi masyarakat yang kritis atau emosional. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat dinamika masyarakat kota yang semakin terbuka dan vokal. Pelatihan komunikasi humanis memang sudah mulai dilakukan, namun belum merata di seluruh jajaran.

Temuan di atas memperlihatkan bahwa strategi komunikasi operasional Brimob di Samarinda dibangun melalui beberapa pendekatan terintegrasi: komunikasi teknis yang disiplin, komunikasi persuasif yang humanis, serta komunikasi publik yang responsif. Strategi tersebut dijalankan dengan sistematis melalui SOP, kode etik komunikasi, serta koordinasi lintas fungsi yang ketat. Namun demikian, faktor pendukung seperti infrastruktur komunikasi dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan tersendiri yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas komunikasi operasional secara menyeluruh.

Dalam konteks ilmu komunikasi, temuan ini menguatkan bahwa komunikasi dalam organisasi semi-militer seperti Brimob bukan sekadar alat penyampaian informasi, tetapi juga merupakan instrumen pengendali strategi, penjaga stabilitas operasional, dan pembangun relasi dengan publik. Ketika strategi komunikasi dijalankan secara terencana, adaptif, dan berorientasi pada kondisi sosial setempat, efektivitas pengelolaan isu keamanan dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini menegaskan posisi penting komunikasi sebagai inti dari setiap keberhasilan operasi keamanan yang dijalankan oleh institusi seperti Brimob.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Komunikasi Operasional Brimob di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi kegiatan operasional, ditemukan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi operasional oleh satuan Brimob di Kota Samarinda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam prosesnya. Faktor-faktor ini tidak hanya bersumber dari aspek internal organisasi, tetapi juga dari kondisi eksternal seperti lingkungan sosial masyarakat, infrastruktur teknologi, serta kebijakan institusional yang berlaku.

Salah satu faktor pendukung yang paling menonjol adalah kedisiplinan struktur organisasi dan ketegasan hierarki komunikasi di tubuh Brimob. Berdasarkan penuturan seorang perwira menengah yang menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional, struktur komando yang jelas mempermudah arus informasi bergerak secara cepat dan terorganisir. Dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi operasional selalu diawali

dengan briefing yang padat dan jelas, di mana setiap anggota sudah memahami siapa yang memberi instruksi, siapa yang menerima, dan apa batas kewenangannya dalam situasi tertentu. Tidak ada ambiguitas dalam alur komunikasi, dan setiap anggota dilatih untuk menghindari komunikasi yang *redundant* atau tidak perlu, terutama saat berada di situasi genting.

Selain struktur, penguasaan teknologi komunikasi modern juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Meskipun penggunaan radio HT (handy talkie) masih menjadi alat utama dalam komunikasi lapangan, satuan Brimob Samarinda telah mulai mengintegrasikan aplikasi komunikasi berbasis internet seperti Zello dan Signal, terutama untuk pengamanan skala besar dan koordinasi antartim. Menurut salah satu operator teknis komunikasi yang diwawancarai, pemanfaatan aplikasi ini membantu mengatasi keterbatasan jangkauan HT, terutama di wilayah Samarinda bagian selatan yang rawan *blank spot*. Dengan sinyal internet yang relatif stabil di area perkotaan, aplikasi tersebut mempercepat pertukaran informasi yang bersifat sensitif dan membutuhkan respons cepat.

Kekompakan tim atau *solidarity team spirit* juga menjadi faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan strategi komunikasi. Dalam beberapa pengamatan di lapangan, terlihat bahwa masing-masing personel tidak hanya berkomunikasi berdasarkan perintah, tetapi juga memiliki ikatan emosional dan rasa saling percaya. Ketika sebuah satuan menghadapi situasi kerumunan, mereka tidak banyak bicara, tetapi satu gerakan atau isyarat saja sudah cukup untuk mengatur formasi atau memberi sinyal mundur. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal dalam satuan Brimob berjalan secara efektif karena dibangun di atas hubungan tim yang erat, hasil dari pelatihan dan pengalaman bersama di lapangan.

Namun demikian, strategi komunikasi yang telah dibangun juga menghadapi beberapa hambatan yang nyata. Hambatan pertama adalah keterbatasan pelatihan komunikasi interpersonal bagi personel operasional. Banyak anggota yang unggul secara teknis dan fisik, tetapi belum mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana menghadapi masyarakat dengan pendekatan persuasif. Dalam wawancara, seorang anggota Brimob yang bertugas di unit pengendalian massa mengakui bahwa ia sering merasa bingung saat harus berbicara kepada warga yang marah atau emosional, karena tidak tahu kata-kata apa yang tepat dan tidak memicu konflik lebih lanjut. Ia berkata:

“Kalau orang sudah emosi, kadang kami bingung harus jawab apa. Takutnya salah ucap, makin panas. Padahal niat kita baik.”

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keterampilan komunikasi bukan sekadar kemampuan berbicara, tetapi juga butuh pendekatan psikologis dan pengendalian emosi yang baik. Tanpa pelatihan yang memadai, strategi komunikasi yang disusun di tingkat staf bisa gagal diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Hambatan lain yang cukup sering muncul adalah perbedaan persepsi antara tingkatan pimpinan dengan pelaksana di lapangan. Dalam beberapa kasus, arahan komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan tidak sepenuhnya dipahami atau bahkan tidak sampai secara lengkap kepada petugas di bawah. Ketika

ditelusuri, permasalahan ini bukan semata-mata karena kurangnya niat, melainkan karena beban tugas yang tinggi dan waktu yang sempit untuk menyampaikan arahan secara menyeluruh. Salah satu personel menyampaikan bahwa saat operasi skala besar berlangsung, briefing hanya dilakukan secara singkat dan langsung kepada komandan regu. Komandan regu inilah yang kemudian menyampaikan ulang ke anggota. Jika terjadi miskomunikasi di level ini, maka strategi yang telah disusun bisa tidak berjalan sesuai rencana.

Selain itu, tantangan geografis dan cuaca Kota Samarinda juga menjadi faktor penghambat dalam komunikasi operasional. Dalam kondisi hujan deras atau banjir lokal yang sering terjadi di musim penghujan, perangkat komunikasi bisa terganggu, termasuk HT yang mengalami gangguan sinyal dan baterai yang cepat habis. Lokasi-lokasi seperti tepian Sungai Mahakam atau jalur pegunungan di sekitar Kecamatan Sambutan menjadi area dengan tantangan teknis cukup besar. Dalam kondisi tersebut, petugas kadang harus mengandalkan komunikasi lisan langsung atau pengiriman personel secara fisik untuk menyampaikan instruksi, yang tentunya mengurangi kecepatan respon.

Di sisi lain, dukungan dari masyarakat lokal terhadap keberadaan Brimob juga menjadi faktor yang *ambigu*. Dalam beberapa kasus, masyarakat menyambut baik kehadiran aparat karena merasa aman. Namun, pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan penggusuran lahan atau pengamanan demonstrasi, Brimob sering kali dicap negatif sebagai simbol kekuatan yang represif. Ketika persepsi masyarakat tidak dikelola dengan baik melalui komunikasi publik yang efektif, resistensi bisa tumbuh dan mengganggu pelaksanaan tugas. Ini menunjukkan bahwa komunikasi strategis Brimob tidak hanya perlu berfokus ke dalam, tetapi juga ke luar menyasar persepsi dan opini publik secara proaktif.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi operasional Brimob Samarinda berjalan dalam dua sisi: satu sisi menunjukkan keberhasilan dalam membangun struktur komunikasi internal yang disiplin dan efisien, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan yang bersifat manusiawi dan teknis. Komunikasi yang efektif hanya dapat tercapai jika ada sinergi antara sistem yang tertata dan kemampuan individu yang mumpuni dalam memahami konteks sosial di lapangan.

Strategi komunikasi dalam organisasi semi-militer seperti Brimob tidak bisa bersifat linier atau satu arah. Dibutuhkan pendekatan yang dinamis, partisipatif, serta adaptif terhadap medan dan masyarakat. Penanganan isu keamanan bukan hanya soal instruksi dan tindakan, tetapi juga tentang *membaca situasi, mengelola persepsi, dan membangun jembatan komunikasi* yang humanis antara aparat dan warga. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi operasional sangat bergantung pada seberapa jauh organisasi mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya secara jujur, serta berani melakukan perbaikan berkelanjutan berbasis pada pengalaman nyata di lapangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi operasional yang diterapkan oleh staf operasional Brimob di Kota Samarinda dijalankan melalui pendekatan terintegrasi yang meliputi komunikasi teknis, komunikasi persuasif, dan komunikasi publik. Komunikasi teknis dijalankan secara disiplin dan berlapis melalui sistem komando yang jelas dengan dukungan perangkat seperti HT, radio UHF, dan aplikasi digital seperti *Zello* serta *Signal*. Pendekatan persuasif diterapkan saat berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama dalam penanganan massa atau situasi konflik sosial, dengan mengedepankan negosiasi dan komunikasi humanis sebelum tindakan represif diambil. Selain itu, komunikasi publik diwujudkan dalam kegiatan yang bersifat preventif seperti pengamanan acara masyarakat dan sosialisasi lapangan, yang memperkuat hubungan positif antara Brimob dan masyarakat Samarinda. Dengan demikian, strategi komunikasi Brimob bukan sekadar penyampaian instruksi, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan melalui koordinasi internal dan hubungan eksternal yang adaptif terhadap kondisi sosial lokal.

Selain strategi yang diterapkan, penelitian ini juga mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan komunikasi operasional Brimob di Kota Samarinda. Efektivitas komunikasi operasional terbukti ditopang oleh struktur organisasi yang disiplin, hierarki komando yang tegas, penguasaan teknologi komunikasi modern, serta kekompakan tim yang tinggi. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan pelatihan komunikasi interpersonal bagi personel, perbedaan persepsi antara pimpinan dan pelaksana lapangan, gangguan teknis akibat kondisi geografis dan cuaca, serta persepsi masyarakat yang kadang negatif terhadap kehadiran aparat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang baik secara struktural belum cukup tanpa diimbangi kemampuan individu memahami konteks sosial, mengelola emosi, dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan strategi komunikasi operasional Brimob ditentukan oleh sinergi antara kesiapan sistem organisasi dan kecakapan personal anggota dalam menerapkan komunikasi yang humanis serta responsif terhadap situasi lapangan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Brimob Samarinda memperkuat kapasitas komunikasi interpersonal dan publik bagi seluruh personel melalui pelatihan khusus yang menekankan pada aspek empati, pengendalian emosi, serta komunikasi lintas budaya. Peningkatan infrastruktur komunikasi seperti repeater dan perangkat digital di wilayah rawan blank spot juga perlu dilakukan guna menjamin kelancaran koordinasi lapangan. Selain itu, diperlukan strategi komunikasi eksternal yang lebih proaktif untuk membangun citra positif di masyarakat melalui keterbukaan informasi, kolaborasi dengan media, dan kegiatan sosial berbasis kemitraan warga. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas pada dimensi

efektivitas komunikasi digital di institusi keamanan dan bagaimana strategi komunikasi operasional beradaptasi dengan era media sosial yang memengaruhi persepsi publik secara cepat dan masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Pendekatan komunikasi humanis dalam institusi keamanan modern: Analisis transformasi komunikasi aparat. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Keamanan Sosial*, 9(2), 115–128.
- Coombs, W. T. (2021). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Effendy, O. U. (2021). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartika, N. (2020). Strategi humas institusi keamanan dalam membangun citra positif di era digital. *Jurnal Komunikasi Publik dan Media*, 8(3), 45–59.
- Liliweri, A. (2021). *Komunikasi Antarbudaya: Membangun Jembatan Memahami Perbedaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyana, D. (2021). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2021). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Permana, D. (2021). Efektivitas komunikasi operasional satuan Brimob dalam penanganan situasi darurat. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Manajemen Keamanan*, 7(1), 67–82.
- Prasetyo, H. (2023). Komunikasi antarbudaya aparat keamanan dan masyarakat lokal dalam menjaga harmoni sosial. *Jurnal Komunikasi dan Budaya Nusantara*, 11(1), 88–103.
- Rachmadani, F. (2021). Strategi komunikasi krisis kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Politik*, 9(4), 56–70.
- Rini, M. (2021). Penerapan komunikasi strategis pada lembaga keamanan: Upaya membangun koordinasi dan efektivitas internal. *Jurnal Komunikasi Organisasi dan Strategi Publik*, 6(2), 101–115.
- Ruslan, R. (2021). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, R. (2021). Peran teknologi dan etika komunikasi dalam efektivitas institusi keamanan. *Jurnal Teknologi dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 22–36.
- Suryani, L. (2022). Komunikasi strategis dan persepsi publik terhadap institusi keamanan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 33–47.
- Sutrisno, B. (2020). Pola komunikasi vertikal dan horizontal dalam lembaga pemasyarakatan: Implikasinya terhadap efektivitas kerja organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Komunikasi*, 8(2), 72–86.